

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada, ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Pengarah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
Pemimpin Redaksi (<i>Editor</i>)	:	Firdaus, S.Sos., M.H.
Anggota Dewan Redaksi (<i>Section Editor</i>)	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ahyar, S.H., M.H.2. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.3. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.4. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.5. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.6. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si7. Donny Michael, S.H., M.H.
Redaksi Pelaksana	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ibnu Prasetyo, S.H.2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (<i>Copyeditor</i>)	:	<ol style="list-style-type: none">1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.2. B. Lora Christyanti, S.IP3. Amirah Balqis S.H.4. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos.5. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P
Teknologi Sistem Informasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Machyudhie, S.T.2. Mochamad Arip, S.Kom.3. Harysandy Permana, S.Kom.4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-upload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada e-journal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix
 Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat (<i>Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan</i>)	 333-352
Evida Kartini; Meidi Kosandi	
 Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (<i>Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective</i>)	 353-368
Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani	
 Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (<i>Human Rights Literacy in the Curriculum of Citizenship Education in Indonesia Higher Education</i>)	 369-386
Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru PA; Fazli Rachman	
 Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (<i>Juridical Analysis of Distance Learning System in Perspective of Human Rights on Constitution 1945 During Covid-19 in Indonesia</i>)	 387-404
Belinda Gunawan	
 Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia (<i>Providing Reasonable Accommodation for Disabilities in Immigration Clearance Process in Indonesia</i>)	 405-418
Bagas Hidayat Putra; Ridwan Arifin	
 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat (<i>Fulfillment of Health Services for Female Inmates at Langkat Narcotics Correctional Institution</i>)	 419-430
Penny Naluria Utami	
 Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia (<i>Development Of Proficiency Of The Life Of Development Citizens In Corruption Institutions Through Work Guidance As A Form Of Fulfilling Human Rights</i>)	 431-444
Hendra Ekaputra; Faisal Santiago	

Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (<i>Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity</i>)	445-466
Achmad Murtadho	
Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum (<i>Revision of Legal Assistance Law to Improve the Fulfillment of Victim's Right to Legal Assistance</i>)	467-486
Hakki Fajriando	
Perspektif Feminisme dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer di Kota Semarang, Indonesia (<i>Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia</i>)	487-504
Adam Salsa Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy	
BIODATA PENULIS	xix

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 11 Nomor 3, Desember 2020. Seperti terbitan sebelumnya, pada edisi ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Volume 11 Nomor 3, Desember 2020 kali ini, dibuka dengan tulisan yang mengulas isu terkini yaitu mengaitkan isu covid-19 dengan Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ada juga tulisan yang membahas Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat, Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Selain ketiga tulisan tersebut, masih ada tulisan-tulisan tentang Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online, Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian, Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer, Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta Revisi UU bantuan hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

REDAKSI

KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
FISIP
Universitas Indonesia
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
4. Prof. Dr. Hibnu Nugroho.
Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
5. Dr. Herlambang P. Wiratraman S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
6. Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
7. Eko Riyadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

KOSONG

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Evida Kartini, Meidi Kosandi (University of Indonesia, Depok)

(Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 333 - 352

This paper elaborates the problems in the fight against human trafficking as a crime against human rights in West Kalimantan, Indonesia. The number of investigated cases and victims of human trafficking tend to stay high from 2007 until today, despite the government's policies and efforts in fighting human trafficking. Difficulty in identifying the victims, perpetrators, and the crime as it happens have made arrests and prevention even more difficult. Qualitative research through document (archive) study and depth interviews was conducted in West Kalimantan from 2017 to 2018 for this research. It examines the factors to the identification problem that affects prevention and eradication of human trafficking in West Kalimantan, a knowledge that beneficial for policymakers and social science development. This paper exposes several interesting findings on the identification problem and the characteristics of the practice of human trafficking in West Kalimantan. As the source of victims and transit area, border control has not been effective, and identification of victims and perpetrators at the borderland has been difficult for geographical and institutional factors. The characteristics of criminal network and Operandi that are normal within the social and economic system and activities, add up to the problem of identifying and in turn of preventing and stopping the crime. This article suggests approaching the problem by community-based prevention and identification of the crime, and further building the capacity of the government institutions in charge of prevention and eradication

Keywords: *anti-trafficking policy; borderland; human trafficking.*

Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 353 - 368

This paper aims to determine the current online loan arrangements and to know the protection of online loan consumer rights from a human rights perspective. The research method used is normative research. The results of the discussion show that the regulation and supervision of online loans has been carried out through the Financial Services Authority. However, there are no regulations on financial technology that impose sanctions on illegal online loan providers. Human rights violations occur because of the complexity between the public's lack of knowledge about the online lending mechanism, and there is no specific regulation regulating Financial Technology, including protection against misuse of personal data, which is an administrative mechanism for conducting Financial Technology transactions. Therefore it can be concluded that the protection of the rights of online loan consumers is still not optimal. This condition needs attention, considering that consumers have fundamental rights that need protection, both as consumers and as humans who have fundamental rights since birth. Thus, there is a need for socialization regarding online lending, drafting a Financial Technology Act as a legal basis for taking action against illegal online loans and enacting the Law on Personal Data Protection.

Keywords: *illegal online loans; consumer rights; protection of human rights.*

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru PA; Fazli Rachman
(State University of Medan, Medan)

(Human Rights Literacy in the Curriculum of Citizenship Education in Indonesia Higher Education)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 369 - 386

Law No. 12 of 2003 concerning National Education System and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education stated that there are four compulsory national subjects of knowledge must be taught to all Indonesian students, namely Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, and Pendidikan Kewarganegaraan. The subject of Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education/PKn) is believed could be able to increase the high awareness of the Indonesian national character and patriotic to the homeland and of the Unitary State of Republic of Indonesia. This article aims to systematically examine the curriculum of PKn in related to reconstruct the remarkable efforts in building democratic citizenship with human rights education. This research using a qualitative method and normative-analytical approach, this article explains the relationship between human rights literacy and democratic citizenship through the curriculum of PKn in Indonesian higher education. In conclusion, improvement and strengthening of human rights literacy paradigm are indispensable solutions to build democratic citizenship. Finally, the paradigm shift of curriculum of citizenship education must be evaluated and embedded with human rights literacy efforts in the advancement of living of democratic citizenship, particularly in the students as a young Indonesian citizen.

Keywords: *human rights; human rights literacy; citizenship education.*

Belinda Gunawan (Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta)

(Juridical Analysis of Distance Learning System in Perspective of Human Rights on Constitution 1945 During Covid-19 in Indonesia)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 387 - 404

Distance learning at elementary schools, junior and senior high schools in Indonesia during Covid-19 has made new social problems associated with the right to education. Those social problems happened because of the misconception of distance learning which is generally interpreted as "online learning" system that brought social gap in education in Indonesia. It is juridical-normative research, using secondary data as the sources. The form of research is prescriptive that give a solution to the social problems in the distance learning activity. The result of the research is that the rules about distance learning in Indonesia exist in Laws Number 20 of 2003 on National Education System and the rules under it, which are following Pancasila (The Five National Principles), The Constitution of Republic of Indonesia 1945 and human rights principles. Distance Learning is a learning system that allows people to use many learning sources, using information and communication technology (ICT) system that has a broader sense than online learning. Distance learning which upholds the fulfilment of the right to education. Can be defined as an education that based on Pancasila and Constitution of Republic of Indonesia 1945, which has to be implemented democratically, fair, non-discriminative and honours the human rights, also needs to involve the roles of government, schools and society.

Keywords : *education; distance learning; ministry of education and culture; right to education.*

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Bagas Hidayat Putra; Ridwan Arifin (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(Providing Reasonable Accommodation for Disabilities in Immigration Clearance Process in Indonesia)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 405 - 418

Immigration clearance process in Indonesia is not focusing on human rights standards and lacking facility for persons with disability. The adoption of human rights aspects in immigration control is limited to providing a priority card, special counter, and priority lane for disabled persons. This study is to analyze the implementation of human rights elements in immigration clearance process through an auto gate machine and manual process by officers by examining secondary data. The result shows that the auto gate is not supporting the human rights principles and facility for passengers with a disability is not yet provided. Besides, the immigration control layout at Indonesia borders is not designed for the passenger with a disability. Thus the auto gate should be redesigned with compatibility for passengers with disability and other subjects. Immigration control area shall be accessible and equipped with facilities for passengers with a disability such as braille letters, guiding block, hearing loop, and wheelchair ramp. Further research may analyze the implementation of human rights in an immigration clearance process from the perspective of regular passengers and officers.

Keywords: *human rights; immigration clearance; person with disability.*

Penny Naluria Utami (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(Fulfilment of Health Services for Female Inmates at Langkat Narcotics Correctional Institution)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 419 - 430

Law No. 12/1995 on Correctional in Article 14 regulates the rights of health care and consumption in correctional institutions. This article provides legal certainty to the obligation to provide services as optimal as possible for the fulfilment of correctional goals. This research aims to find out the fulfilment of health services for female inmates and the obstacles faced by Langkat Narcotics Correctional Institution, Medan – North Sumatra. Using research methods in the form of studies that can see the facts in the application and library studies include legislation, documents and literature. The results showed in general, the fulfilment of health services for female inmates is still inadequate, and following the standards set. It is because there are no health workers, such as general doctors and limited medical equipment. Nevertheless, the Correctional Institution has tried to provide adequate health services such as health checks on sick inmates and other health activities.

Keywords: *female inmates; health services; narcotics correctional institution.*

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Hendra Ekaputra; Faisal Santiago (Borobudur University, Jakarta)

(Development Of Proficiency Of The Life Of Development Citizens In Corruption Institutions Through Work Guidance As A Form Of Fulfilling Human Rights)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 431 - 444

Law No. 12 of 2003 concerning National Education System and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education stated that there are four compulsory national subjects of knowledge must be taught to all Indonesian students, namely Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, and Pendidikan Kewarganegaraan. The subject of Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education/PKn) is believed could be able to increase the high awareness of the Indonesian national character and patriotic to the homeland and of the Unitary State of Republic of Indonesia. This article aims to systematically examine the curriculum of PKn in related to reconstruct the remarkable efforts in building democratic citizenship with human rights education. This research using a qualitative method and normative-analytical approach, this article explains the relationship between human rights literacy and democratic citizenship through the curriculum of PKn in Indonesian higher education. In conclusion, improvement and strengthening of human rights literacy paradigm are indispensable solutions to build democratic citizenship. Finally, the paradigm shift of curriculum of citizenship education must be evaluated and embedded with human rights literacy efforts in the advancement of living of democratic citizenship, particularly in the students as a young Indonesian citizen.

Keywords: *human rights; human rights literacy; citizenship education.*

Achmad Murtadho (Brawijaya University, Malang)

(Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 445 - 466

Provision of Restitution to child victims criminal acts of obscenity still passive and limited, case in Pekanbaru District Court Decision Number 13/Pid. Sus-Anak/2017 /PN.Pbr has been as a forgotten Person. The perspective of KUHAP regulations regarding restitution has weaknesses in workings of law in a responsive social reality of protecting victims, due deficiencies or obstacles in legislation so that it doesn't accommodate the rights of victims. This research types Normative. Problem is whether the victim has appropriate protection regulations on criminal justice Children and how the concept of progressive laws. The aim is to identify and formulate the concept of Child. In conclusion, First, decision case Number 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr in the paradigm of child victim protection in construction of Applicable laws and regulations. There are no articles in the Criminal Code and Procedure Code, including law enforcement policies, that is on obligations to claim for compensation in Court's decision. Second, the progressive implementation the cross-examination to giving the perspective of child victims who must be given the obligation to consider compensation in criminal justice as an additional or alternative criminal policy. Namely being imposed with the main criminal and placing the victim's perspective as one of the conditions for making Child Protection Law as well as on Sentence.

Keywords: *restitution; victims child; criminal acts obscenity.*

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Hakki Fajriando (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(Revision of Legal Assistance Law to Improve the Fulfillment of Victim's Right to Legal Assistance)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 467 - 486

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid often deemed not optimal in providing legal assistance. Including to crime victims, even though they are often needed to reduce the suffering of victims for criminal acts, they have experienced and is also able to prevent intimidation of victims. This paper aims to provide an overview of the weaknesses of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in order to emphasize the importance of revisions to improve the fulfilment of victim's rights to legal aid as well as reformulating the law to improve the fulfilment of victim's right to legal aid. This empirical normative research was conducted qualitatively through interviews using the zoom application and literature study. Data analysis was carried out using qualitative analysis based on an interactive model from Miles and Huberman. The results showed the weakness of Law 16/2011, among other the mismatch with other laws and insufficient protection for victims and other vulnerable groups rights for legal assistance. Law 16/2011 should be revised to ensure the protection of victims' rights to legal assistance, among others, through synchronization of regulations, expansion of the concept of legal aid recipients, and equality of legal aid between perpetrators and victims

Keywords: *legal aid; victims; access to justice.*

Adam Salsa Novarin, Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy (Diponegoro University, Semarang)

(Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia)

Human Rights Journal, Vol. 11, Number 3, December 2020, page 487 - 504

Human Rights, including the sexual right of, is a concept that should be upheld by countries with a democratic system. Therefore, the enforcement of human rights for sexual minority groups must also be a concern of democratic governments, including the protection of the queer group. The queer group already exists and develops inside the indigenous culture of Indonesia, such as the gender division of the Bugis tribe, namely Calalai, Calabai, and Bissu. Nevertheless, this research shows that oppression and discrimination against queer groups are still rife. This research uses qualitative method with data collected through the guided interview technique, where primary data sources were obtained through interviews with Rumah Pelangi Semarang. The data collected is then analyzed using feminism, gender, and queer theories. The result of this research indicates that actors and forms of oppression of queer groups in Indonesia, as well as ambiguity and distortion in the understanding of sexuality in Indonesian society, who are hegemony of a patriarchal system, are the cause of this discrimination.

Keywords: *queer; human rights; democracy; gender; feminism.*

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Evida Kartini, Meidi Kosandi (Universitas Indonesia, Depok)

(Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 333 – 352

Tulisan ini menjelaskan fenomena kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat. Kasus-kasus kejahatan dan korban perdagangan orang di Kalimantan Barat cenderung tetap banyak dari tahun ke tahun, terlepas dari usaha keras pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memeranginya. Sulitnya melakukan identifikasi terhadap praktik kejahatan dan korban pada saat kejahatan perdagangan orang sedang berlangsung membuat usaha untuk menindak dan mencegahnya menjadi semakin sulit. Manfaat praktis dari riset ini adalah menyediakan informasi berbasis riset empiris tentang faktor-faktor yang menghambat pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang. Riset kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan di Kalimantan Barat selama 2017-2018 menghasilkan beberapa temuan menarik mengenai masalah identifikasi dan karakteristik perdagangan orang di Kalimantan Barat. Sebagai daerah jalur transit dan pemasok korban, pengawasan dan identifikasi sulit dilakukan karena faktor geografis dan institusional. Selain itu, karakteristik jejaring pelaku kejahatan dan operasinya yang cenderung normal menambah sulit identifikasi, dan pada gilirannya menambah sulit pula penindakan maupun pencegahan kejahatan perdagangan orang di Kalimantan Barat. Artikel ini merekomendasikan pendekatan identifikasi dan pencegahan yang berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas institusional lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan serta pencegahan perdagangan orang.

Kata kunci: daerah perbatasan; human trafficking; kebijakan anti-trafficking.

Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta)

(Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 353 – 368

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pinjaman online saat ini serta mengetahui perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pinjaman online telah dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum terdapat regulasi tentang *financial technology* yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Pelanggaran HAM terjadi karena kompleksitas antara kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online serta belum terdapat regulasi khusus yang mengatur *Financial Technology* termasuk juga perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang merupakan suatu mekanisme administratif dalam melakukan transaksi *Financial Technology*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian mengingat pengguna layanan memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi mengenai pinjaman online, penyusunan Undang-Undang *Financial Technology* sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal dan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci: pinjaman online ilegal; hak pengguna; perlindungan HAM.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru PA; Fazli Rachman (Universitas Negeri Medan, Medan)

(Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 369 – 386

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan empat mata kuliah wajib nasional, yakni mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan PKn wajib diajarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Mata kuliah PKn diyakini mampu meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap identitas nasional dan memiliki jiwa patriot terhadap tanah air. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normatif tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hak asasi manusia dan kewarganegaraan demokratis melalui kurikulum PKn. Kesimpulannya, perbaikan dan penguatan kurikulum PKn harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berpijak pada paradigma membangun kecerdasan hak asasi manusia. Pergeseran paradigma kurikulum PKn wajib dievaluasi dan dilekatkan dengan upaya-upaya kecerdasan hak asasi manusia dalam peningkatan kehidupan kewarganegaraan demokratis khususnya bagi mahasiswa sebagai warga negara muda Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia; literasi hak asasi manusia; pendidikan kewarganegaraan.

Belinda Gunawan (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)

(Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 387 – 404

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan permasalahan sosial baru terkait dengan hak atas pendidikan. Permasalahan sosial tersebut dikarenakan adanya miskonsepsi PJJ yang umumnya diartikan sebagai pembelajaran daring (*online*) yang berakibat pada timbulnya kesenjangan sosial dalam pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Bentuk penelitian yaitu penelitian preskriptif untuk memberikan saran atas permasalahan PJJ. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengertian PJJ dalam hukum positif dan kesesuaiannya dengan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan dalam hukum Indonesia, yang bermanfaat bagi institusi pendidikan dan pengenyam pendidikan dasar dan menengah dalam melaksanakan PJJ. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PJJ di Indonesia telah memiliki dasar hukum pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan peraturan-peraturan dibawahnya yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan prinsip-prinsip HAM. PJJ merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar, melalui teknologi komunikasi dan informasi yang lebih luas dari sekedar pembelajaran daring saja sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. PJJ yang menjunjung tinggi pemenuhan hak atas pendidikan dapat diartikan yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dimana pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, sehingga untuk mewujudkannya perlu melibatkan peran pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat.

Kata kunci: pendidikan; pembelajaran jarak jauh; kemendikbud; hak atas pendidikan.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Bagas Hidayat Putra; Ridwan Arifin (Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

(Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 405 – 418

Penerapan prinsip HAM dalam proses pemeriksaan keimigrasian seperti penyediaan fasilitas untuk penumpang penyandang disabilitas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia masih minim dan belum sesuai standar. Implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI baru sebatas pemberian kartu prioritas, penyediaan konter khusus, dan jalur prioritas untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta serta kajian literatur dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI yang meliputi pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* bagi penyandang disabilitas dan melalui konter manual oleh petugas imigrasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa belum ada implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* di TPI dan minimnya fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Selain itu, tata letak area imigrasi di TPI belum dilengkapi dengan fasilitas untuk segala jenis penyandang disabilitas. Maka, perlu adanya penyesuaian bentuk serta ukuran *autogate* secara fisik untuk penggunaan *autogate* yang lebih optimal. Perlu ada peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas di area imigrasi agar pemeriksaan keimigrasian yang lebih efektif dan berbasis HAM, seperti huruf *braille*, *guiding block*, *hearing loop*, dan *wheelchair ramp*. Riset berikutnya dapat mengkaji HAM dalam pemeriksaan keimigrasian dari perspektif penumpang umum (selain penyandang disabilitas) dan paradigma petugas.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; tempat pemeriksaan imigrasi; penyandang disabilitas.

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jakarta Selatan)

(Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 419 – 430

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dan kendala-kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, Medan – Sumatera Utara. Menggunakan metode penelitian berupa studi lapangan dimana melihat langsung fakta dalam penerapan yang dilakukan dan studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukan, secara umum pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan masih belum memadai dan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini, akibat belum ada tenaga kesehatan seperti dokter umum dan terbatasnya peralatan kesehatan. Namun demikian, pihak lembaga pemasyarakatan telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang cukup seperti adanya pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana yang sakit dan kegiatan kesehatan lainnya.

Kata kunci: narapidana perempuan; pelayanan kesehatan; lembaga pemasyarakatan narkotika.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Hendra Ekaputra; Faizal Santiago (Universitas Borobudur, Jakarta)

(Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 431 – 444

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menyelesaikan konflik, serta memperbaiki warga binaan agar nantinya mampu berbaur dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan perlu melaksanakan sistem pemasyarakatan yang berorientasi terhadap pembinaan. Dalam hukum hak asasi manusia, pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan adalah upaya pemenuhan hak asasi manusia yakni hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan pengembangan diri. Pada penelitian ini membahas kajian terhadap pertanyaan (1) bagaimana peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan; (2) bagaimana peraturan perundangan dapat memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap kajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. perlu diketahui bahwa dari perautran-peraturan yang ada, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan berorientasi terhadap pembinaan warga binaan guna memperbaiki pribadinya sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan dapat melanjutkan hidup serta membangun hidupnya kembali untuk memperoleh hidup yang sejahtera dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; bimbingan kerja; Hak Asasi Manusia.

Achmad Murtadho (Universitas Brawijaya Malang)

(Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 445 – 466

Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih bersifat pasif dan terbatas, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pb yang tidak memuat kepentingan Anak Korban atau disebut sebagai *Forgotten Person*. Pesrpektif peraturan KUHAP serta peraturan lainnya engenai ganti kerugian pada Hak Anak Korban memiliki kelemahan dalam bekerjanya hukum secara Responsif dengan realitas sosial perlindungan Anak Korban, karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban yang seharusnya kerugian Korban termuat pada putusan tersebut. Jenis Penelitian ini Normatif. Permasalahannya apakah peraturan perlindungan korban telah sesuai pada peradilkan pidana Anak dan bagaimana konsep hukum secara progresifnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi serta merumuskan konsep Undang-Undang PerlindunganAnak melalui putusan Pengadilan. Kesimpulannya Pertama, Putusan perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dalam paradigma perlindungan Korban Anak telah dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu belum adanya pasal pada KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan penegakkan hukum yaitu pada kewajiban untuk memberikan tuntutan ganti kerugian pada putusan Pengadilan. Kedua, secara progresif diberlakukannya *cross examination* dengan memberi perspektif Anak Korban yang harus diberi kewajiban dalam mempertimbangkan ganti kerugian pada peradilkan pidana sebagai kebijakan pidana tambahan atau alternatif yaitu dijatuhkan bersama pidana pokok dan menempatkan persepektif korban sebagai salah satu syarat pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pada Putusan Pengadilan.

Kata kunci: ganti kerugian; anak korban; tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Hakki Fajriando (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta)

(Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 467 – 486

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipandang belum optimal dalam memberikan bantuan hukum termasuk kepada korban tindak pidana meski bantuan hukum tersebut sesungguhnya diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya serta juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kelemahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga penting dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut demi meningkatkan pemenuhan hak korban atas bantuan hukum serta usulan reformulasi perundangan bantuan hukum demi meningkatkan pemenuhan hak korban atas bantuan hukum. Penelitian normatif empiris ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara menggunakan aplikasi zoom dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang 16/2011 masih memiliki kelemahan yakni belum sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan lain serta belum optimal dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak dan kebutuhan korban dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang 16/2011 perlu direvisi untuk menjamin terlindunginya hak korban atas bantuan hukum, antara lain melalui sinkronisasi peraturan, perluasan konsep penerima bantuan hukum, serta kesetaraan bantuan litigasi dan non-litigasi bagi pelaku dan korban.

Kata kunci: bantuan hukum; korban; akses terhadap keadilan.

Adam Salsa Novarin, Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy (Universitas Diponegoro, Semarang)

(Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok *Queer* di Kota Semarang, Indonesia)

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 3, Desember 2020, hal 487 – 504

Hak Asasi Manusia seharusnya merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh negara dengan sistem demokrasi, salah satunya adalah *sexual rights*. Oleh karena itu, penegakan HAM bagi kelompok minoritas seksual juga harus menjadi perhatian pemerintah demokratis, termasuk perlindungan kelompok minoritas seksual *queer*. Kelompok *queer* ini sejatinya sudah ada dan berkembang dalam budaya asli Indonesia seperti pembagian gender suku Bugis yakni Calalai, Calabai, dan Bissu. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok *queer* masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terarah (*guided interview*) dengan LSM Rumah Pelangi Semarang. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori feminisme, gender, dan *queer*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aktor serta bentuk penindasan terhadap kelompok *queer* di Indonesia, serta adanya ambiguitas dan distorsi dalam pemahaman seksualitas pada masyarakat Indonesia yang terhegemoni sistem patriarki, menjadi penyebab terjadinya diskriminasi ini.

Kata kunci: *queer*; hak asasi manusia; demokrasi; gender; feminisme.